



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

LIBERALISASI PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh:

SHERRY RAMADHANI

BP. 06 151 069


Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi

PADANG

2010

	No. Alumni Universitas	SHERRY RAMADHANI	No. Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a).Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 15 April 1988 b).Nama Orang Tua: H. Zulkifli Bustamam dan Hj. Ratnasari c).Fakultas: Ekonomi d).Jurusan: Ilmu Ekonomi e).No.BP: 06151069 f).Tgl lulus: 26 Agustus 2010 g).Predikat lulus: Sangat Memuaskan h).IPK: 3,32 i).Lama Studi: 4 Tahun j).Alamat Orang Tua: Jl. Semarang no B-14 Ulak karang selatan RT 3 RW 10, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat</p>		

LIBERALISASI PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Skripsi S1 Oleh : **Sherry Ramadhani** Pembimbing: **Prof.Dr.H.Syafuddin Karimi,S.E,M.A**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang liberalisasi perbankan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan kredit perbankan dan suku bunga pinjaman terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Untuk menganalisis liberalisasi perbankan Indonesia setelah penandatanganan Lol antara Indonesia dan IMF tahun 1997 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (Ordinary Least Square), yakni analisis regresi berganda untuk melihat bagaimana pengaruh ketiga variabel. Data yang digunakan adalah suku bunga pinjaman, kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan negative antara suku bunga pinjaman dengan pertumbuhan ekonomi. Jika kerdit perbankan meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Serta jika suku bunga pinjaman meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat Oleh sebab itu, pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan moneter. Karena Liberalisasi berdampak positif jika Indonesia telah menjadi negara yang ekonomi stabil.

Keyword: Liberalisasi perbankan, pertumbuhan ekonomi

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Agustus 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1.Pembimbing	2. Penguji	3 .Penguji
Nama Terang	Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA	Dra. Laksmi Dewi, SE, MSi	Fery Andrianus,S.E,M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi: **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**
NIP. 130 812 952

_____ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 telah membawa pengaruh buruk bagi perekonomian negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Philipina dan Korea. Apalagi, adanya tekanan dari badan internasional, terutama dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Akibatnya, negara-negara bagian benua Asia melakukan liberalisasi pasar keuangan dan pasar modal pada dasawarsa 90-an (Stiglitz, 2002: 4). Tekanan tersebut merupakan kebijakan Washington Consensus. Jadi, liberalisasi pasar keuangan dan pasar modal di bagian benua Asia bukan disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan dana negara dalam peningkatan perekonomian, melainkan tekanan internasional.

Menurut Williamson (dalam Stiglitz, 2002: 9), Washington Consensus menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat (Stiglitz, 2002: 9). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa, Bank Dunia dan banyak pihak lain telah berusaha untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih baik. Namun, perubahan sistematis melalui sistem kredit dan penciptaan struktur regulasi yang mengendalikan perilaku pengambilan resiko yang berlebih, amatlah sulit, sehingga rekapitalisasi sistem perbankan (solusi untuk jangka pendek) lebih diminati (Stiglitz, 2002: 18-19).

Dengan adanya tekanan dari Badan Internasional tersebut (IMF dan Bank Dunia), Indonesia menandatangani LoI yaitu *Letter of Intent* (LoI). LoI memuat kebijakan liberalisasi,

deregulasi dan privatisasi yang mengubah arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan krisis moneter (Muzaqqi, 2009).

Menurut Bawazier (2009), di tahun 1998, di bawah tekanan IMF dan pengawalan tim ekonomi jebolan Berkeley, Pemerintah Indonesia amat gencar melaksanakan kebijakan ekonomi Neoliberal, baik di bidang perbankan, sistem devisa bebas, perdagangan, investasi, migas dan pertambangan, pasar uang dan modal, transportasi, impor pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Bawazier, 2009). Bank tidak lagi terfokus kepada penyaluran kredit usaha tetapi lebih kepada inflasi dan nilai tukar uang.

Padahal, kebijakan Washington Consensus ini lebih tepat digunakan untuk negara seperti di Amerika Latin, karena negara tersebut lebih maju dari Indonesia. Kebijakan yang mengandung unsur politik ini telah membuat Indonesia di ambang kehancuran pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh IMF memberikan solusi kebijakan tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kebijakan fiskal bukan kebijakan moneter.

Menurut Kufepaksi, kebijakan-kebijakan Washington consensus ini di antaranya, disiplin fiskal (*fiscal policy discipline*), pemerintah harus mengupayakan surplus neraca perdagangan dengan cara mengupayakan agar tingkat ekspor lebih besar daripada tingkat impor. *Public expenditure* atau anggaran pengeluaran untuk publik, pemerintah harus meminimalisasi pengeluaran-pengeluaran subsidi untuk dialokasikan pada bidang lain yang lebih menjanjikan perbaikan distribusi pendapatan seperti untuk pendidikan dan kesehatan. Liberalisasi keuangan (*interest rates*): penetapan suku bunga yang berdasarkan pada mekanisme pasar. Privatisasi (*privatization of state enterprise*): menyerahkan kepemilikan atas aset atau perusahaan negara kepada swasta (Kufepaksi).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pertumbuhan kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan tingkat suku bunga pinjaman. Hubungan tingkat suku bunga pinjaman dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Peningkatan pertumbuhan suku bunga pinjaman menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Secara bersamaan (keseluruhan), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kredit perbankan dan suku bunga pinjaman. Kredit perbankan secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga pinjaman secara statistik signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Jadi, pertumbuhan ekonomi meningkat apabila kredit perbankan meningkat dan suku bunga pinjaman menurun. Masyarakat banyak yang meminjam uang ke bank untuk peningkatan produktifitas dengan suku bunga pinjaman yang terjangkau. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat.

Dalam jangka pendek (1994-2008), liberalisasi sektor perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perbankan yang diuji dalam penelitian ini ada dua, yaitu kredit perbankan dan suku bunga pinjaman. Kredit perbankan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sedangkan suku bunga pinjaman mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya liberalisasi yang menjad

bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian, khususnya bidang perbankan.

Kebijakan pemerintah yang mengikuti arah kebijakan yang dilakukan negara lain (liberalisasi sektor perbankan) telah membuat sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang positif, tetapi kesejahteraannya tidak merata. Dari kebijakan tersebut, dengan adanya paksaan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktifitas, akibatnya tingkat persaingan ekonomi semakin ketat.

Setelah penandatanganan LoI antara Indonesia dan IMF pada tahun 1997, salah satu kebijakannya adalah liberalisasi keuangan. Menurut data *world bank*, kredit perbankan Indonesia rata-rata kurang dari 40% hingga 62%. Sementara itu, suku bunga pinjaman berkisar antara 13% hingga 32%. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 2% hingga 5%.

6.2 Saran

Pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam persetujuan kebijakan moneter internasional. Karena liberalisasi kurang sesuai digunakan untuk negara berkembang. Liberalisasi akan bisa digunakan secara maksimal jika kesejahteraan negara tersebut meningkat dan stabil. Hal ini menjadikan Indonesia tidak bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia. Infrastruktur didalam negara sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu sebelum muncul kebijakan moneter dari Pemerintah.

Liberalisasi sektor perbankan sebenarnya bisa meningkatkan kompetisi produktivitas masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Tetapi dalam kondisi ini, banyak ekonom yang berpendapat bahwa, jika negara berkembang seperti Indonesia menggunakan sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Rini Dwi. 2005. "Dampak Liberalisasi Keuangan dan Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970 – 2002. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi negara berkembang*, Vol.10 No.1 hal: 13-30 (Yogyakarta, April 2005).
- Badan Pusat Statistik. 2010. "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia" pada Katalog BPS:3101015. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 9 Juli 2010. 21:00 WIB.
- Bank Indonesia. 2010. *Tinjauan Kebijakan Moneter; Ekonomi, Moneter dan Perbankan Bank Indonesia Juni 2010*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Bank Indonesia. 2009. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Bank Indonesia Triwulan IV-2009*. Jakarta: Biro Kerjasama dan Studi ASEAN Direktorat Internasional.
- Bank Indonesia. 2008. "Tinjauan Umum Makro Ekonomi 2008". <http://www.bi.go.id>. Diakses pada 16 Juli 2010. 07.00 WIB.
- Bank Indonesia. 1999. "Laporan Keuangan Bank Indonesia 1998-1999". <http://www.bi.go.id>. Diakses pada 10 Juli 2010. 21.35 WIB.
- Bank Indonesia. "Sejarah Bank Indonesia: moneter periode 1997-1999". <http://www.bi.go.id>. Diakses pada 15 Juli 2010. 18.13 WIB.
- Bawazier, Fuad. "Melanjutkan Neoliberalisme". *Harian Seputar Indonesia* (Kamis, 10 September 2009).
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Deutsche Bundesbank. 2005. "Credit Growth, Bank Capital and Economic Activity". Monthly report March 2005. <http://www.bundesbank.de>. Diakses pada 13 Juli 2010. 20.46 WIB.
- Detik Finance. 2010. "Rasio Kredit RI Terendah di Asia". <http://www.detikfinance.com>. Diakses pada 30 Juli 2010. 22.46 WIB.
- Dornbusch, Rediger dan Stanley Fischer. 1997. *Makro Ekonomi edisi ke-4*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- ECON 490. 2006. "The Harrod Domar Model". Thornton Spring. <http://www.econ.washington.edu>. Diakses pada 16 Agustus 2010. 23.05 WIB.
- Hadi, Didik Kurniawan. 2009. "Dampak Krisis Keuangan Global Bagi Indonesia". <http://didik2h.web.ugm.ac.id>. Diakses pada 16 Juli 2010. 21.34 WIB.